

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA  
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490  
WEBSITE: [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-5290 /PB/2018 6 Juli 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Hal : Penyampaian Permintaan *Username* dan *Password* Aplikasi e-Rekon&LK G2  
Operator Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/Satker Tidak Aktif  
Bersaldo pada Kementerian Negara/Lembaga

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/  
Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga  
(terlampir)

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-3689/KN/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Dalam Aplikasi e-Rekon&LK G2 (atau selanjutnya disebut e-Rekon), UAKPB (Satker) terbagi menjadi 3 status:
    - a. Satker Aktif, yaitu Satker yang pada tahun berjalan (dalam hal ini tahun 2018) memiliki DIPA;
    - b. Satker Tidak Aktif Bersaldo, yaitu Satker yang pada tahun berjalan (dalam hal ini tahun 2018) tidak memiliki DIPA, atau pernah memiliki DIPA namun telah direvisi menjadi NIHIL, serta pada tanggal akses ke aplikasi e-Rekon memiliki Saldo pada Neraca; dan
    - c. Satker Tidak Aktif Tidak Bersaldo, yaitu Satker yang pada tahun berjalan (dalam hal ini tahun 2018) tidak memiliki DIPA, atau pernah memiliki DIPA namun telah direvisi menjadi NIHIL, serta pada tanggal akses ke aplikasi e-Rekon tidak memiliki Saldo pada Neraca.
  2. Pada tiga status sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan data pada menu referensi Satker di e-rekon, dapat terbagi menjadi:
    - a. Ada dalam referensi Satker di e-Rekon.  
Satker ini dapat dibuatkan *username* dan *password* untuk mengakses aplikasi e-Rekon (unggah saldo awal, monitoring, cetak laporan, dll).
    - b. Tidak ada dalam referensi Satker di e-Rekon.  
Satker ini **tidak** dapat dibuatkan *username* dan *password* untuk mengakses aplikasi e-Rekon.
- Referensi Satker yang terdapat pada aplikasi e-Rekon meliputi Kode Bagian Anggaran, Eselon I, Kode Satker, dan Jenis Kewenangan.
3. Pengunggahan saldo awal BMN ke aplikasi e-Rekon wajib dilakukan oleh seluruh UAKPB (Satker) di Kementerian Negara/Lembaga dengan status:
    - a. Aktif; dan
    - b. Tidak Aktif Bersaldo per tanggal 1 Januari 2018;baik yang ada di referensi e-Rekon maupun yang tidak ada.


4. Ketentuan unggah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Satker yang dapat diberikan *username* dan *password*, maka dapat mengunggah Saldo Awal BMN melalui *username* Satker masing-masing;
  - b. Untuk Satker yang tidak dapat diberikan *username* dan *password* karena tidak terdapat dalam referensi satker di e-Rekon, maka unggah Saldo Awal BMN dilakukan melalui *username* UAPB (tingkat Kementerian Negara/Lembaga).
5. Dalam surat DJKN di atas disampaikan bahwa pembuatan dan distribusi *username* dan *password* e-Rekon untuk operator SIMAK-BMN pada UAKPB merupakan kewenangan KPPN.
6. Sehubungan dengan hal-hal di atas, untuk memperoleh *username* dan *password* diatur sebagai berikut:
- a. Untuk *username* dan *password* Satker Aktif, UAKPB (Satker) dapat langsung meminta ke KPPN mitra kerjanya masing-masing;
  - b. Untuk *username* dan *password* Satker Tidak Aktif Bersaldo per tanggal 1 Januari 2018 yang terdapat dalam referensi Satker di e-Rekon, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan *softcopy* surat permintaan *username* dan *password* ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan c.q. Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan BUN dengan dilampiri daftar UAKPB dalam format *excel* sebagaimana pada Lampiran II surat ini ke alamat email [bai.dit.apk@gmail.com](mailto:bai.dit.apk@gmail.com) dan/atau [bai.dit.apk.dipb@kemenkeu.go.id](mailto:bai.dit.apk.dipb@kemenkeu.go.id), paling lambat **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



  
Firmansyah N. Nazaroedin  
NIP 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
5. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia

**LAMPIRAN I**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-5290/PB/2018

Tanggal : 6 Juli 2018

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR UMUM/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Sekretaris Jenderal BPK RI
5.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
9.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
30.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
32.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
35.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
39.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
46.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

2

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
66.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
68.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif

2

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-5296 /PB/2018

Tanggal : 6 Juli 2018

DAFTAR UAKPB DENGAN STATUS TIDAK AKTIF BERSALDO PER TANGGAL 1 JANUARI 2018

YANG TERDAPAT DALAM REFERENSI SATKER DI E-REKON&LK

UNTUK MENDAPATKAN *USERNAME* DAN *PASSWORD* E-REKON&LK

Kementerian Negara/Lembaga (Kode BA): ..... (....)

No.	Kode BA	Kode Es. I	Kode Satker	Jenis Kewenangan	Uraian Nama Satker

Jakarta, Juli 2018

.....

Nama.....

NIP.....

6